



**EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2020
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2020**

I. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Australia (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>)	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka. Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 6 Februari 2020
2.	RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka. Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 12 Mei 2020
3.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR / KOMISI VII	Merupakan RUU Carry Over. Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 12 Mei 2020
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka. Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 14 Juli 2020
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation</i>)	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka. Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 14 Juli 2020
6.	Rancangan Undang-Undang tentang	PEMERINTAH	RUU Kumulatif

	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>)		Terbuka. Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 14 Juli 2020
7.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR/Anggota/ Kumulatif Terbuka	RUU Kumulatif Terbuka Usul Anggota Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 1 September 2020
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka Usul Anggota Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 15 September 2020

II. RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN (PEMBICARAAN TINGKAT I)

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH	Merupakan RUU Carry Over Surpres Tgl 4 Juni 2015, No. R-35/Pres/06/2015 RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III MP. IV 2014-2015 sesuai Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 24 Juni 2015.
2.	RUU tentang Bea Materai.	PEMERINTAH	Merupakan RUU Carry Over Surpres Tgl 16 Juli 2018 No. R-34/Pres/07/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 6 September 2018 MP I 2018-2019 dibahas oleh Komisi XI
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	PEMERINTAH	Merupakan RUU Carry Over Surpres Tgl 12 November 2018 No. R-53/Pres/11/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 29 November 2018 MP II 2018-2019 dibahas oleh Komisi III
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	PEMERINTAH	Surpres Tgl 24 Januari 2020 No. R-05/Pres/01/2020 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 3 Februari 2020 MP II 2019-2020 dibahas oleh Komisi I
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas	PEMERINTAH	Surpres Tgl ... Februari 2020 Nomor

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
	Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (<i>Omnibus Law</i>)		Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus MP III 2019-2020 dibahas oleh Komisi XI
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (Dalam Surpres berjudul Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja) (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	Surpres Tgl 7 Februari 2020 Nomor R-06/Pres/02/2020 Tgl 2 April 2020 MP III 2019-2020 dibahas oleh Badan Legislasi
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	Surpres Tgl 20 Mei 2020 Nomor : R-24/Pres/05/2020 (Mendagri, Menkeu, Bapennas, Menlu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menkumham) Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 16 Juni 2020 MP IV 2019-2020 dibahas oleh Pansus
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/Komisi VIII	Selesai Harmonisasi Tgl 8 Mei 2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 12 Mei 2020 Surpres Tgl 20 Juli 2020 No. R-33/Pres/07/2020 (Menteri Sosial, Mendagri, Menkeu, Menpan RB, Menkes, dan Menkumham) Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 2020 dibahas oleh Komisi VIII
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan <i>Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Service under the ASEAN Framework Agreement</i>	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka Surpres Tgl 30 Desember 2019 No. R-58/Pres/12/2019 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 21 Januari 2020 dibahas oleh Komisi XI
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka Surpres Tgl 27 Februari 2020 No. R-08/Pres/02/2020 Tgl 26 Februari 2020 dibahas oleh Komisi I
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka Surpres Tgl 13 Agustus 2020 No. R-35/Pres/08/2020 (Menkeu, Bapennas, Menkumham) dibahas oleh Badan Anggaran

III. RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/Anggota	Surat Pengusul (2 orang Anggota dari Fraksi Gerindra) No.2127/II/2020, Tgl 5 Februari 2020, permintaan utk di harmonisasi Selesai Harmonisasi Tgl 19 Februari 2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 2 April 2020 Menunggu Surpres
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila)	DPR/Badan Legislasi	Selesai Penyusunan di Badan Legislasi Tgl 22 April 2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 12 Mei 2020 Menunggu Surpres
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi)	DPR/Anggota	Surat Pengusul (Desy Ratnasari/FPAN) No. 0028/DR.PAN/I/2020 tgl 27 Januari 2020 permintaan utk di harmonisasi Selesai Harmonisasi Tgl 29 Juni 2020 Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/Badan Legislasi	Selesai disusun Badan Legislasi Tgl 1 Juli 2020 Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/Anggota	Surat Pengusul (12 Anggota FP Nasdem) No. F.NasDem.054/DPR-RI/II/2020 tgl 6 Februari 2020 permintaan utk di harmonisasi Selesai Harmonisasi Tgl 4 September 2020 Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR
6.	RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR/Komisi III	Surat Pengusul (Komisi III) Nomor: 332-DW/KOM.III/MP.I/VIII/2020 tgl 25 Agustus 2020 permintaan utk di harmonisasi Selesai Harmonisasi Tgl 17 September 2020 Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR

IV. RUU DALAM TAHAP HARMONISASI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/Anggota	Surat Pengusul (5 org Anggota lintas Fraksi) tgl 7 Februari 2020 permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/Komisi II	Surat Pengusul (Komisi II) Nomor: LG/077/KOM.II/08/20 20 tgl 31 Agustus 2020 permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi

V. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR/Komisi III	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR/Komisi V	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/Komisi VI	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/Komisi VII	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/Komisi IX	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/Komisi X	
7.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR/Badan Legislasi	Dalam Proses Penyusunan

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/Badan Legislasi	
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR/Anggota	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR/Anggota	
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR/Anggota	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/Anggota	

VI. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	PEMERINTAH	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara (<i>Omnibus law</i>)	PEMERINTAH	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH	
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
	Nasional		
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH	

1) Peraturan/RUU Usul DPR yang telah diharmonisasi / di susun / di bahas oleh Badan Legislasi selama Tahun 2020 adalah :

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib	-	Disetujui dalam Rapat Badan Legislasi Tgl 13 Februari 2020. Ditetapkan dalam Rapat Paripurna Tgl 2 April 2020
2.	Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/Anggota	Selesai diharmonisasi oleh Badan Legislasi pada Tanggal 19 Februari 2020. Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 2 April 2020
3.	Harmonisasi RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	RUU Kumulatif Terbuka Usul DPR/Anggota	Selesai diharmonisasi oleh Badan Legislasi pada Tanggal 19 Februari 2020. Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 2 April 2020 Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 1 September 2020
4.	Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang	-	Disetujui dalam Rapat Badan Legislasi Tgl 30 Maret 2020. Ditetapkan dalam Rapat Paripurna Tgl 2 April 2020
5.	Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/Komisi VIII	Selesai Harmonisasi Tgl 8 Mei 2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 12 Mei 2020 Surpres Tgl 20 Juli 2020 No. R-33/Pres/07/2020 (Menteri Sosial, Mendagri, Menkeu, Menpan RB, Menkes, dan Menkumham) Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 2020 dibahas oleh Komisi VIII
6.	Penyusunan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila (Judul dalam Prolegnas RUU ttg Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila)	DPR/Badan Legislasi	Selesai Penyusunan di Badan Legislasi Tgl 22 April 2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 12 Mei 2020 Menunggu Surpres
7.	Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/Anggota	Surat Pengusul (23 Anggota dari FP Nasdem) No. F.NasDem.035/DPR-RI/I/2020 tgl 31 Januari 2020 permintaan utk di harmonisasi Selesai Harmonisasi Tgl 11 Mei 2020 Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR Berdasarkan hasil Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 pada bulan Juli 2020, RUU ini termasuk RUU yang di keluarkan dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
8.	Harmonisasi RUU tentang Praktik Psikologi	DPR/Anggota	Surat Pengusul (Desy Ratnasari/FPAN) No. 0028/DR.PAN/I/2020 tgl 27 Januari 2020 permintaan utk di harmonisasi Selesai Harmonisasi Tgl 29 Juni 2020 Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR
9.	Penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/Badan Legislasi	Selesai Penyusunan di Badan Legislasi Tgl 1 Juli 2020 Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/Anggota	Surat Pengusul (12 Anggota FP Nasdem) No. F.NasDem.054/DPR-RI/II/2020 tgl 6 Februari 2020 permintaan utk di harmonisasi Selesai Harmonisasi Tgl 4 September 2020 Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR
11.	RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR/Komisi III	Surat Pengusul (Komisi III) Nomor: 332-DW/KOM.III/MP.1/VIII/2020 tgl 25 Agustus 2020 permintaan utk di harmonisasi Selesai Harmonisasi Tgl 17 September 2020 Dlm Proses Harmonisasi